



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Jumat

Tanggal: 20 Mei 2016

Halaman: 2

ANGGARAN DIBERIKAN SEKALIGUS NPHD Diteken, Pilwali Tak Bisa Mundur

YOGYA (KR) - Agenda Pemilihan Walikota (Pilwali) Yogya 2017 tidak bisa diundur dan pemungutan suara ditetapkan 15 Februari 2017. Hal ini seiring penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) terkait anggaran Pilwali Yogya.

NPHD tersebut ditandatangani langsung Walikota Yogya, Haryadi Suyuti, Kamis (19/5), disaksikan jajaran KPU, Bawaslu, instansi pemkot, Polresta dan Kodim Yogya. "Kami sudah menetapkan Keputusan KPU Yogya No 10 menyangkut pedoman teknis tahapan dan jadwal Pilwali. Dengan penandatanganan NPHD ini, maka kemungkinan terjadinya pengunduran menjadi tidak terpenuhi," ungkap Ketua KPU Kota Yogya, Wawan Budianto usai penandatanganan NPHD.

Anggaran yang akan dihibahkan Pemkot Yogya untuk penyelenggaraan Pilwali tersebut mencapai Rp 14,9 miliar. Jika penye-

lenggaraan sebelumnya pencairan dilakukan secara bertahap, namun kali ini diberikan sekaligus. Dengan begitu, tidak ada alasan bagi KPU untuk menunda tahapan.

Wawan menyampaikan, tahapan Pilwali sebenarnya sudah berjalan usai diterbitkannya Peraturan KPU (PKPU) No 3 Tahun 2016. Langkah awal yang kini dipersiapkannya ialah perekrutan badan adhoc yang meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

PPK dan PPS tersebut merupakan kepanjangan tangan KPU untuk penye-

lenggaraan di tingkat kecamatan dan kelurahan. "Setelah dana cair ini, maka kami semakin mantap melangkah. Kami akan rekrut 70 PPK dan 150 PPS mulai 20 Juni hingga 21 Juli 2016. Masing-masing lima orang di tiap kecamatan dan tiga orang di tiap kelurahan," imbuhnya. Dari total dana yang diterima KPU tersebut, 60 persen untuk urusan kegiatan dan 40 persen honorarium.

Sementara itu, Walikota Yogya Haryadi Suyuti, mengatakan sudah tidak ada keraguan lagi bahwa Pilwali Yogya 2017 bisa diselenggarakan setelah NPHD ditetapkan sebelum batas akhir penetapan, 22 Mei 2016. "Harapannya, penyelenggaraan pilkada bisa berlangsung aman dan lancar karena selama ini, Yogya selalu menjadi barometer pelaksanaan pemilihan umum di tingkat nasional," katanya. **(Dhi)-m**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Amat Segera	Untuk Ditanggapi
2. Sekretariat Komisi Pemilihan U			

Yogyakarta, 15 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005